

#### BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament "EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN TIM SENERGI BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

# KEGIATAN

MS IV Tahun Sidang 2021-2022 (16 - 29 Maret 2022)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA ÄHLI AKD

\$7/4/2022

# **DAFTAR ISI**

KOMISI I	1
A. FUNGSI LEGISLASI	1
B. FUNGSI ANGGARAN	1
C. FUNGSI PENGAWASAN	4
KOMISI II	10
D. FUNGSI LEGISLASI	10
E. FUNGSI ANGGARAN	10
F. FUNGSI PENGAWASAN	10
G. TUGAS KHUSUS	11
KOMISI III	12
A. FUNGSI LEGISLASI	12
B. FUNGSI ANGGARAN	12
C. FUNGSI PENGAWASAN	13
KOMISI IV	34
A. FUNGSI LEGISLASI	34
B. FUNGSI ANGGARAN	34
C. FUNGSI PENGAWASAN	34

KOMISI V	36
A. FUNGSI LEGISLASI	36
B. FUNGSI ANGGARAN	36
C. FUNGSI PENGAWASAN	36
KOMISI VI	42
A. FUNGSI LEGISLASI	42
B. FUNGSI ANGGARAN	42
C. FUNGSI PENGAWASAN	42
KOMISI VII	52
A. FUNGSI LEGISLASI	52
B. FUNGSI ANGGARAN	52
C. FUNGSI PENGAWASAN	52
KOMISI VIII	56
A. FUNGSI LEGISLASI	56
B. FUNGSI ANGGARAN	56
C. FUNGSI PENGAWASAN	64

KOMISI IX	66
A. FUNGSI LEGISLASI	66
B. FUNGSI ANGGARAN	66
C. FUNGSI PENGAWASAN	67
KOMISI X	79
A. FUNGSI LEGISLASI	79
B. FUNGSI ANGGARAN	79
C. FUNGSI PENGAWASAN	79
KOMISI XI	84
A. FUNGSI LEGISLASI	84
B. FUNGSI ANGGARAN	84
C. FUNGSI PENGAWASAN	84
BADAN LEGISLASI	90
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	91
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN	95
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA	97
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA	99

# LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI I

#### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pengesahan		Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDPU	
	Persetujuan antara		dengan Pakar/Akademisi, yaitu:	
	Pemerintah Republik		1. Prof. Huala Adolf, SH., LLM., Ph.D;	
	Indonesia dan Pemerintah		2. Kusnanto Anggoro, Ph.D;	
	Republik Fiji tentang Kerja		3. Curie Maharani Savitri, Ph.D.	
	Sama Bidang Pertahanan		Dalam rangka mendapatkan masukan terkait	
	(Agreement between the		RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara	
	Government of The Republic		Pemerintah Republik Indonesia dan	
	of Indonesia and the		Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama	
	Government of The Republic		Bidang Pertahanan.	
	of Fiji concerning			
	Cooperation in the Field of			
	Defence).			

## **B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN**

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	BAKAMLA	Rapat dengar Pendapat	Realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2021 BAKAMLA	••••
2.	BSSN	Rapat dengar Pendapat	Realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2021 BSSN	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	LPP RRI dan LPP TVRI	Rapat dengar Pendapat	Realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2021 LPP RRI dan LPP TVRI:  1. Komisi I DPR RI mengapresiasi capaian kinerja LPP TVRI TA 2021 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.165.947.375.385 atau 93,67% dari total pagu anggaran sebesar Rp1.244.697.794.000. Selanjutnya, Komisi I DPR RI mendorong LPP TVRI untuk terus meningkatkan kinerjanya agar menjadikan Lembaga Penyiaran Publik yang mandiri, kuat, handal, professional serta terdepan.  2. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Dewas dan Dirut LPP RRI tentang evaluasi dan realisasi pelaksanaan anggaran Tahun 2021 sebesar Rp1.178.922.072.866 atau 84.16% dari total pagu anggaran sebesar Rp1.400.776.485.000. Berkaitan dengan realisasi anggaran LPP RRI yang belum optimal, Komisi I DPR RI meminta LPP RRI untuk secara sunguh sungguh berupaya meningkatkan realisasi anggaran tahun berikutnya dan menjadi evaluasi perbaikan kinerja ke depannya	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	Kemkominfo, KPI, KIP, dan Dewan Pers	Rapat dengar Pendapat	Realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2021 Kemkominfo, KPI, KIP, dan Dewan Pers:  1. Komisi I DPR RI mengapresiasi capaian kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) TA 2021 dan realisasi anggaran sebesar Rp 23.413.632.669.949,- atau 96,99% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 24.139.342.400.000, Selanjutnya, Komisi I DPR RI mendorong Kemkominfo untuk terus meningkatkan kinerjanya.  2. Komisi I DPR RI mengapresiasi capaian kinerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Komisi Informasi (KI) Pusat dan Dewan Pers TA 2021 dan realisasi anggarannya sebagai berikut:  a. KPI Pusat sebesar Rp 49.572.343.952,- atau 94,40% dari total pagu anggaran sebesar Rp 52.513.706.000,  b. KI Pusat sebesar Rp 32.763.701.154,- atau 97,26% dari total pagu anggaran sebesar Rp 33.688.353.000,  c. Dewan Pers sebesar Rp 28.769.832.599,- atau 88.91% dari total pagu anggaran sebesar Rp 32.357.313.000,  Selanjutnya, Komisi I DPR RI mendorong KPI Pusat, KI Pusat dan Dewan Pers untuk terus berupaya meningkatkan kinerjanya.	

## C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	BAKAMLA	<ul> <li>a. Program prioritas</li> <li>Bakamla terkait</li> <li>Keamanan Laut</li> <li>Tahun 2022;</li> <li>b. Isu-isu aktual</li> <li>strategis lainnya.</li> </ul>	RDP Komisi I DPR RI dengan Bakamla	
2.	BSSN	a. Peran BSSN terhadap isu transformasi digital dan keamanan siber dalam upaya mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan P20 bulan September 2022 dan KTT G20 bulan November 2022 di Bali; dan b. Peran BSSN dalam menghadapi tren keamanan siber saat ini dan tantangan masa depan.	RDP Komisi I DPR RI dengan BSSN	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	LPP TVRI dan LPP RRI	1. LPP TVRI:  a) Kesiapan LPP TVRI sebagai host broadcaster dalam hajatan G 20; b) LPP TVRI sebagai stasiun siaran luar negeri baru sebagai kekuatan soft diplomacy 2. LPP RRI: a) Penguatan jaringan siaran RRI berbasis multiplatform di wilayah 3T dan daerah blankspot sebagai media layanan informasi dan edukasi penguatan NKRI; b) Peran LPP RRI dalam penyuksesan penyelenggaraan G20.	RDP Komisi I DPR RI dengan LPP TVRI dan LPP RRI	1. Dalam rangka mensukseskan Presidensi G20 tahun 2022, Komisi I DPR RI mengharapkan LPP TVRI yang telah ditunjuk menjadi Host Broadcaster Presidensi G20 2022 sesuai surat penunjukan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI dan LPP RRI dapat memaksimalkan perannya masing masing serta membangun sinergi dan kolaborasi sehingga mewujudkan sebaran informasi publik yang kredibel, jernih, lancar serta memiliki daya jangkau ke segenap lapisan masyarakat Indonesia dan dunia internasional tentang pelaksanaan KTT G20.  2. Selanjutnya, Komisi I DPR RI juga telah mendengarkan penjelasan dari LPP TVRI terkait pengajuan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Sehubungan dengan

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
NO		ODOEN PENGAWASAN	INTO SINGRAT	pelaksanaan G 20 Summit untuk perluasan jaringan satelit dan Pay TV ke seluruh dunia sebesar Rp 80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar) untuk kontrak selama setahun. kontrak selama setahun. Selama setahun 3. Komisi I DPR RI mendukung TVRI World sebagai stasiun siaran luar negeri baru dan kekuatan soft diplomacy dalam upaya promosi, pariwisata, seni, budaya, berita tentang Indonesia, dan isu-isu aktual untuk pemirsa dalam dan luar negeri.  4. Komisi I DPR RI mendukung LPP RRI dalam upaya peningkatan pelayanan dan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui penguatan jaringan siaran
				RRI berbasis multiplatform di wilayah 3T dan daerah blankspot sebagai media
				layanan informasi dan edukasi penguatan NKRI
				serta memperluas jangkauan

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				siaran (coverage area), khususnya daerah blankspot yang sebelumnya sama sekali tidak bisa menerima sinyal radio serta terpenuhinya jangkauan siaran RRI di wilayah 3T.
4.	Kemenkominfo, KPI, KIP,	a. Penjelasan tentang	RDP Komisi I DPR RI	1. Berkaitan dengan Arus Data
	Dewan Pers	kesiapan Kemkominfo dalam menyukseskan presidensi melalui 3 isu DEWG (Digital Economy Working Group) utamanya di Arus Data Lintas Batas Negara (Cross border data flow and data free flow with trust); b. Penjelasan terkait Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024; c. Progress pembentukan Pansel Calon KPI Pusat	dengan Kemenkominfo, KPI, KIP, Dewan Pers	Lintas Batas Negara (Cross Data Border Data Flow and Data Free Flow with Trust) yang merupakan salah satu isu DEWG (Digital Economy Working Group) dalam pertemuan G-20, Komisi I DPR RI dan Kemkominfo secara bersama-sama serius menindaklanjuti pembahasan RUU PDP dan menuntaskannya, sehingga menjadi payung hukum komprehensif guna memberikan jaminan terhadap perlindungan dan keamanan data serta menjaga kedaulatan negara.
		Periode 2022-2025 d. Isu-isu aktual lainnya.		2. Komisi I DPR RI mendukung langkah Kemkominfo untuk melakukan transformasi

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				digital dengan merujuk pada peta jalan Indonesia Digital 2021-2024. Sehubungan hal
				tersebut, Komisi I DPR RI
				meminta Kemkominfo untuk
				penyiapan regulasi
				pendukung serta
				indikator/parameter keberhasilan pelaksanaan
				peta jalan digital 2021-2024.
				3. Komisi I DPR RI meminta
				Kemkominfo untuk mengawal
				keberadaan LPP TVRI agar
				tetap menjadi Host
				Broadcaster Presidensi G20
				tahun 2022 merujuk surat
				penunjukan dari Menteri
				Koordinator Bidang
				Kemaritiman dan Investasi
				(Menko Marves) RI dengan mempertimbangkan
				keberadaan LPP TVRI sebagai
				LPP yang kredibel, teruji dan
				jangkauan siaran yang luas.
5.	Kemenhan dan Kemenkeu		Raker Komisi I DPR	Pembahasan persetujuan
			RI dengan	penjualan Barang Milik Negara
			Kemenhan dan	berupa Kapal Eks KRI Teluk
			Kemenkeu	Sampit-515 pada Kementerian
				Pertahanan R.I. Setelah

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				mendengarkan penjelasan Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Keuangan, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, dan pendapat Fraksi-fraksi, Komisi I DPR RI memutuskan menyetujui usulan penjualan Barang Milik Negara berupa Kapal Eks KRI Teluk Sampit-515 pada Kementerian Pertahanan sesuai dengan Surat Presiden RI Nomor R-57/Pres/12/2021 perihal "Permohonan Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kapal Eks KRI Teluk Sampit-515 pada Kementerian Pertahanan" dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.	Kodam IV/Diponegoro Jawa Tengah; Kodam V/Brawijaya; Jawa Timur dan Lanal Denpasar Bali		Kunjungan Kerja Spesifik	

# LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI II

#### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang ASN	<ul><li>a. Penyusunan</li><li>b. Pembahasan</li><li>c. Harmonisasi;</li><li>d. Prolegnas;</li><li>e. Pemantauan &amp; peninjauan</li></ul>	Konsinyering Panja RUU tentang ASN dengan Pemerintah, membahas DIM	Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah sepakat akan membahas RUU tentang ASN secara lebih mendalam

#### **B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN**

\_

#### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan LAN	c. Pelaksanaan undang-undang; d. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau e. Kebijakan pemerintah.	Kujungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke STIA LAN Makassar, IPDN Jatinangor, dan STPN Yogyakarta	Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan sekolah kedinasan

#### D. TUGAS KHUSUS

- 1. Mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan pertimbangan atas keputusan berdasarkan mufakat;
- 2. Pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar;
- 3. Persetujuan pemindahtanganan asset negara;
- 4. Persetujuan perjanjian internasional yang berdampak luas;
- 5. Pemilihan anggota BPK;
- 6. Penegakan kode etik;
- 7. Kerja sama antar parlemen;
- 8. Akuntabilitas keuangan;
- 9. Kerumahtanggaan DPR RI;

# LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

#### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Hukum Acara Perdata		Berdasarkan Keputusan Rapat Intern Komisi III DPR RI tanggal 16 Maret 2022 untuk kegiatan Pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata akan diawali dengan mendengarkan masukan dari para narasumber setelah itu akan dilaksanakan kunjungan kerja luar negeri yang akan dilaksanakan sekitar bulan Juni atau Juli 2022.	
2.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika		Berdasarkan Keputusan Rapat Intern Komisi III DPR RI tanggal 16 Maret 2022 bahwa pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2022, yaitu Raker Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi & Birokrasi.	
3.	RUU tentang Penyadapan		Belum ada kegiatan penyusunan RUU tentang Penyadapan, karena pendeknya hari kerja pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022.	

## **B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN**

\_

## C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<ol> <li>Kapolda Jawa Tengah</li> <li>Kapolres Sukoharjo</li> <li>Kadensus 88</li> </ol>	Kunjungan Kerja Spesifik	Pengawasan penegakan hukum terkait dengan penanganan kasus Terorisme di Solo.	<ol> <li>Dilaksanakan pada hari Jumat sd Minggu, tanggal 17 sd 19 Maret 2022.</li> <li>Kunspek dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Bambang wuryanto, MBA.</li> <li>Anggota Tim berdasarkan proporsional komposisi fraksi.</li> </ol>
2.	Warga Bojong Koneng     Warga Cijayanti	Kunjungan Kerja Spesifik	Pengawasan penegakan hukum terkait dengan kasus penguasaan lahan oleh PT. Sentul City, Tbk.	<ol> <li>Dilaksanakan pada hari Jumat sd Minggu, tanggal 17 sd 19 Maret 2022</li> <li>Kunspek dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.</li> <li>Anggota Tim berdasarkan proporsional komposisi fraksi.</li> </ol>
3.	Kadensus 88 Anti Teror     POLRI     Deputi Penindakan dan     Pembinaan Kemampuan     BNPT	Rapat Dengar Pendapat  (Rapat Bersifat TERTUTUP)	<ul> <li>Membahas:</li> <li>1. Data-data terkait kasus terorisme &amp; evaluasi pelaksanaan tugas &amp; fungsi.</li> <li>2. Pola koordinasi dengan instansi lain.</li> <li>3. Anggaran penanganan perkara terorisme.</li> </ul>	<ol> <li>RDP dilaksanakan secara fisik &amp; virtual.</li> <li>Pelaksanaan tanggal 21 Maret 2022, Raker dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Bambang Wuryanto, MBA.</li> </ol>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI)	Rapat Dengar Pendapat Umum	Membahas: Penyampaian pandangan serta masukan terkait dengan uji materiil UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan oleh PT. Musica Studios ke Mahkamah Konstitusi RI.	<ol> <li>RDPU dilaksanakan secara fisik &amp; virtual.</li> <li>Pelaksanaan tanggal 22 Maret 2022, RDPU dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, MM.</li> <li>RDPU dihadiri oleh Ketua Umum FESMI beserta jajaran.</li> <li>Bahasan:         <ol> <li>Perusahaan rekaman menguasai hak ekonomi atas komersialisasi dengan sistem sold flat (jual putus). Dimana dalam perjanjian jual putus para pencipta diharuskan untuk menyerahkan ciptaanya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas ciptaan beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu. Yang artinya pencipta lagu dan pelaku pertnjukan hanya akan dibayar sekali untuk eksploitasi tanpa batas waktu.</li> <li>Dengan keberadaan Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28</li> </ol> </li> </ol>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				Tahun 2014, pengembalian
				seluruh hak ekonomi kepada
				pencipta dan pelaku
				pertunjukan atas karya musik
				yang sudah dialihkan kepada
				pihak lain secara jual putus
				setelah 25 tahun.
				3)PT. Musica Studios
				mengajukan permohonan untuk membatalkan
				keberadaan Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122. Padahal tanpa
				melakukan pembatalan atas
				pasal tersebut, hak produser
				fonogram (label) tetap utuh.
				Namun mengapa masih
				merampas hak dari pencipta
				dan pelaku pertunjukan.
				4) FESMI menginginkan Pasal 18,
				Pasal 30 dan Pasal 122 UU
				Nomor 28 Tahun 2014 tentang
				Hak Cipta untuk tetap ada.
				5. Tanggapan Komisi III DPR RI:
				1) Dalam sidang Uji Materiil atas
				UU Nomor 28 Tahun 2014
				tentang Hak Cipta, Komisi III
				DPR RI telah memberikan
				jawaban di hadapan sidang

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				Majelis Hakim Konstitusi pada
				tanggal 14 Maret 2022.
				2) Dalam Petitum DPR RI
				memohon kepada Ketua Majelis
				Hakim Kontitusi memberikan
				amar putusan:
				a. Menyatakan bahwa
				Pemohon (PT. Musica
				Studios) tidak memiliki
				kedudukan hukum ( <i>legal</i>
				standing) sehingga
				permohonan <i>a quo</i> harus
				dinyatakan tidak dapat
				diterima (niet ontvankelijk
				verklaard).
				b. Menolak permohonan <i>a quoa</i>
				untuk seluruhnya atau
				paling tidak menyatakan
				permohonan <i>a quo</i> tidak
				dapat diterima.
				c. Menerima Keterangan DPR
				RI secara keseluruhan.
				d. Menyatakan Pasal 18, Pasal
				30, Pasal 63 ayat (1) huruf b,
				dan Pasal 122 UU Nomor 28
				Tahun 2014 tentang Hak
				Cipta tidak bertentangan
				dengan UUD Negara RI

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. e. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RI sebagaimana mestinya. 3) Komisi III DPR RI akan terus mengawal jalannya persidangan Uji Materiil UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Mahkamah Konstitusi.
5.	Amnesty International	Rapat Dengar Pendapat Umum	Membahas: Pelanggaran HAM di Intan Jaya, Papua Tahun 2020- 2021	<ol> <li>RDPU dilaksanakan secara fisik &amp; virtual.</li> <li>Pelaksanaan tanggal 22 Maret 2022, RDPU diterima oleh Wakil Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M.</li> <li>Bahasan:         <ol> <li>Eskalasi konflik di Kabupaten Intan Jaya, papua sejak akhir tahun 2019 berdampak terhadap bertambahnya jumlah pasukan keamanan. Berdasarkan pemantauan Amnesty International</li> </ol> </li> </ol>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				setidaknya ada 17 pos militer dan polisi di Intan Jaya. Penambahan jumlah pasukan ini mengakibatkan masyarakat setempat hidup di tengah ketakutan dan mengalami pembatasan pergerakan sehari-hari.  2) Amnesty International melakukan riset tentang situasi di Intan Jaya termasuk meneliti eskalasi konflik bersenjata, pelanggaran HAM serta rencana Pemerintah Indonesia melakukan penambangan di Blok Wabu.  3) Temuan Amnesty International menunjukkan bahwa Intan Jaya telah menjadi hotspot konflik dan represi di tengah meningkatnya jumlah pasukan keamanan.  4) Amnesty International khawatir dengan potensi dampak dari pertambangan di Blok Wabu terhadap hak asasi manusia, ditambah dengan risiko konflik di Kabupaten Intan Jaya

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				terhadap HAM. Menjadi perhatian khusus adalah kendala untuk melakukan konsultasi dengan Orang Asli Papua yang terdampak guna mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan terkait pertambangan di Blok Wabu.  5) Amnesty International menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk mencegah pelanggaran HAM yang terjadi sebagai akibat dari kehadiran pasukan keamanan Indonesia dan memastikan bahwa kegiatan militer tidak dilakukan di tanah Orang Asli Papua kecuali dibenarkan oleh kepentingan publik yang relevan atau secara bebas disetujui dan diminta oleh
				mereka.  4. <b>Tanggapan Komisi III DPR RI</b> : 1) Di MPR ada yang namanya "MPR for Papua" yang terdiri atas 10 Anggota DPR RI dari Papua, maka Komisi III DPR RI

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				mengusulkan agar Amnesty International juga dapat menyampaikan materi tentang pelanggaran HAM di Intan Jaya 2020-2021 ini kepada "MPR for Papua".  2) Komisi III DPR RI perlu mendalami secara serius kasus pelanggaran HAM di Intan Jaya 2020-2021.  3) Keberadaan aparat di Papua berkaitan dengan politik Pemerintah Indonesia.  4) Komisi III DPR RI akan meminta Pemerintah mencari jalan keluar sebaik-baiknya dalam menangani kasus ini.  5) Komisi III DPR RI akan mengadakan rapat internal untuk membahas kasus ini sehingga dapat mengambil sikap kedepannya akan seperti apa.
6.	1. Jaksa Agung Muda	Rapat	Membahas:	1. RDP dilaksanakan secara fisik &
	Tindak Pidana Khusus	Dengar	1. Capaian target PNBP di	virtual.
	2. Jaksa Agung Muda	Pendapat	tahun 2021 & target	2. Pelaksanaan tanggal 23 Maret
	Tindak Pidana Umum	-	pencapaian PNBP di	2022 pukul 10.00 – 14.00 WIB,

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			tahun 2022 serta renstra Program Prioritas 2022 2. Pelaksanaan tupoksi dalam rangka optimalisasi Penyelamatan Keuangan Negara serta meningkatkan terget PNBP.	<ol> <li>Raker dipimpin oleh Wakil Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M</li> <li>Kesimpulan:         <ol> <li>Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk menyiapkan data-data mengenai kasuskasus yang berkaitan dengan penyelamatan keuangan negara yang sudah berkekuatan hukum tetap minimal dalam 5 (lima) tahun terakhir untuk kemudian dilaporkan pada Komisi III DPR RI.</li> <li>Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memberikan penjelasan terkait inventarisasi terhadap penyelamatan keuangan negara sebesar Rp.21,2Trilyun berdasarkan penjelasan Jaksa Agung pada Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 17 Januari 2022.</li> </ol> </li> </ol>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7.	1. Jaksa Agung Muda Pembinaan 2. Jakasa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara	Rapat Dengar Pendapat	Membahas:  1. Capaian target PNBP di tahun 2021 & target pencapaian PNBP di tahun 2022 serta renstra Program Prioritas 2022  2. Pelaksanaan tupoksi dalam rangka optimalisasi Penyelamatan Keuangan Negara serta meningkatkan terget PNBP	<ol> <li>1. RDP dilaksanakan secara fisik &amp; virtual.</li> <li>2. Pelaksanaan tanggal 23 Maret 2022 pkl. 15.30 WIB - selesai,</li> <li>3. RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M.</li> <li>4. Kesimpulan:         <ol> <li>Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan tentang capaian target penerimaan negara bukan pajak (PNPB) tahun 2021 dan target pencapaian penerimaan negara bukan pajak (PNPB) tahun 2022 serta capaian yang dihasilkan dalam penyelamatan dan pemulihan kerugian negara tahun 2021 dan target capaian di tahun 2021 dan target capaian di tahun 2022 dari Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara di sektor masingmasing.</li> <li>Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara untuk</li> </ol> </li> </ol>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				menyampaikan data-data mengenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) minimal dalam 5 (lima) tahun terakhir untuk kemudian dilaporkan pada Komisi III DPR RI.  3) Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara untuk meningkatkan capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2022 maupun penyelamatan dan pemulihan kerugian negara tahun 2022 dengan tetap memegang tupoksi masing-masing.
8.	DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Rapat Dengar Pendapat Umum	Membahas: Konsultasi mengenai Raperda ttg Perubahan atas Perda Kaltim No. 10 Th. 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit	<ol> <li>RDPU dilaksanakan secara fisik &amp; virtual.</li> <li>Pelaksanaan tanggal 24 Maret 2022 pkl. 10.00 – 11.00 WIB</li> <li>RDPU dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M.</li> <li>Bahasan:         <ol> <li>DPRD Provinsi Kaltim menyampaikan bahwa batubara dan kelapa sawit</li> </ol> </li> </ol>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				menjadi hal yang menakutkan bagi jalan umum hampir di seluruh daerah di Kaltim.  2) Perda Kaltim No. 10 Tahun 2012 sudah berjalan sejak tahun 2013, tetapi dalam beberapa proses terkait dengan izin, terdapat sekitar 40 perusahaan yang melakukan pengangkutan batubara dan kelapa sawit yang tidak melakukan flyover untuk crossing jalan di jalan umum/jalan APBN di Kaltim.  3) Ada beberapa tahapan izin yang terbentur dengan Perda Kaltim tersebut sehingga Perda Kaltim tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik.  4) DPRD Provinsi Kaltim ingin meminta masukan dan dukungan dari Komisi III DPR RI dalam rangka melakukan
				revisi atas Perda Kaltim No. 10 Tahun 2012 yang akan menghasilkan peraturan yang dapat dilaksanakan dengan

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				baik dan bermanfaat bagi masyarakat Kaltim.
				5. <b>Tanggapan Komisi III DPR RI</b> :
				1) Mengoptimalkan kerja tim
				terpadu pengawasan dan
				pengendalian, penyelenggaraan
				jalan umum dan khusus untuk kegiatan tambang dan kelapa
				sawit yang dibentuk melalui
				SK GUbernur No . 700 Tahun
				2013.
				2) Hal terberat adalah bagaimana
				menghapus praktik pungli
				yang efektif di lapangan. 3) Masukan yang diberikan
				dalam catatan tentang aturan
				jalan tambang, yaitu diatur
				dalam UU No. 3 Tahun 2020
				tentang perubahan atas UU
				No. 4 Tahun 2009 tentang
				pertambangan, mineral, dan batubara yang diatur dalam
				Pasal 91. Seharusnya kegiatan
				pertambangan termasuk
				kelapa sawit membangun jalan
				sendiri.
				4) Disarankan agar DPRD
				Provinsi Kalimantan Timur

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				meminta pengamanan kepada Polda Kalimantan Timur, jika tidak diindahkan maka nanti Komisi III DPR RI akan melihat di mana masalahnya dan apa pelanggarannya.  5) Penambang batubara yang memiliki IUP biasanya sudah memiliki jalan sendiri, tidak melalui jalan umum. Pihak penambang batubara yang biasanya yang menggunakan jalan umum adalah pihak penambang batubara ilegal. Permasalahannya adalah aparat kepolisian dan PPNS Perhubungan yang tidak berani untuk menindak para pihak penambang batubara ilegal tersebut.  6) Jika memang ada tendensi aparat yang bermain dalam hal ini, agar diserahkan datanya yang lengkap kepada Komisi III DPR RI, yang berisi jalan mana saja yang digunakan dan siapa pelakunya. Jika data tersebut benar adanya, memang benar

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				terjadi pelanggaran, harus segera ditindak tegas.  7) Komisi III DPR RI juga dapat bekerja sama dengan Kejaksaan Agung jika memiliki data yang lengkap dari DPRD Provinsi Kaltim atas permasalahan ini  8) Perda yang akan direvisi harus ada diskresi keterkaitan pemerintah daerah dan kewenangan pemerintah pusat dalam hal penegakan hukum. Selain itu, DPRD Provinsi Kaltim harap melakukan konsultasi dengan aparat penegak hukum dalam proses revisi Perda tersebut.  9) Disarankan agar Pansus Pembahas Raperda juga berkonsultasi dengan Komisi II, Komisi V, dan Komisi VII DPR RI.
9.	1. Divisi Perempuan Tim Relawan Untuk	Rapat Dengar	Membahas: 1. Pelimpahan kasus	RDPU dilaksanakan secara fisik     & virtual.
	Kemanusiaan (TRUK)	Pendapat	eksploitasi di 4 Pub di	2. Pelaksanaan tanggal 23 Maret
	, ,	Umum	Maumere, agar	2022 pukul 11.00 – 12.00 WIB,
				RDPU diterima oleh Wakil Komisi

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	2. Tim Kuasa Hukum Korban Binomo "BINARY OPTION"		ditangani oleh Mabes Polri.  2. Kasus Kejahatan Trading Ilegal Binomo	III DPR RI, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M.  3. Bahasan: a. Divisi Perempuan Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (TRUK) 1) Pada bulan Juni 2021 TRUK menerima 17 anak korban TTPO dari Polda NTT. 17 anak tersebut merupakan anak di bawah umur yang dipekerjakan di empat pub di wilayah Sikka. 17 anak tersebut diterima dan ditampung di Shelter St. Monika Maumere dan dilakukan pendampingan dan penguatan psikologis terhadap setiap anak 2) Pada 27 Juni 2021 empat dari tujuh belas anak melarikan diri yang kemudian di hari yang sama tiga belas anak lainnya juga berusaha melarikan diri. Kemudian TRUK meminta bantuan kepada Polres Sikka dan meminta bantuan polisi

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				untuk mengejar ketiga belas anak tersebut. Hingga akhirnya tiga belas anak tersebut bisa diamankan dan kembali ke shelter St. Monika  3) Sejak awal kasus ini ditangani oleh pihak kepolsian, UU yang digunakan adalah UU Ketenagakerjaan dan UUPA. Dari 3 pelaku hanya satu pelaku yang baru dihukum  4) Bahwa Polres Sikka dan Polda NTT tidak memberi kepastian hukum dan keadilan bagi korban dan masyarakat umum sehingga TRUK meminta agar kasus ini diambil alih oleh Mabes Polri.  5) Meminta Komisi III DPR RI untuk bersama dengan TRUK untuk melakukan audiensi dengan Mabes Polri untuk mencari keberadaan tiga anak lainnya yang melarikan diri.

Dengan mendapa anak yang melar tersebut, maka da lainnya bisa dihu b. Kuasa Hukum Korba (Binary Option).  1) Trading Ilegal Bis sudah menjadi ka masyarakat kare memakan korbas ratusan ribu ora sudah menjadi k	N
2) Kebanyakan kormuda, sekitar 20 tahun, Kerugian dialami korban ratusan milyar ratusan milyar ratusan milyar ratusan milyar ratusah menjadi pemerintah baik BAPPEBTI dan jubeberapa anggot DPR RI 4) Korban Binomo imelaporkan platu Binomo dan juga Binomo di Bares	rikan diri dua pelaku ukum ban Binomo inomo keresahan ena in perkiraan ang yang korban. ban berusai 0 hingga 30 i yang mencapai rupiah inomo ini perhatian k OJK, uga ta Komisi III ini sudah tform a afiliator

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				2022. Terkait laporan korban Binomo sudah dilakukan pemeriksaan kepada pelapor dan saksi, namun belum ada penetapan tersangka  5) Terlapor juga melaporkan korban Binomo dengan pasal pencemaran nama baik  6) Ada baiknya Mabes Polri juga melakukan penyitaan terhadap aset digital (crypto, saham dll) yang dimiliki para tersangka, bukan hanya aset fisik.  7) Data-data akan disampaikan kepada Komisi III berikut nama-nama afiliator, sebelum tanggal 28 Maret 2022.  4. Tanggapan Komisi III DPR RI: a. Divisi Perempuan Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (TRUK):
				1) Komisi III mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh TRUK.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				2) TPPO yang terjadi di
				Maumere, NTT perlu untuk
				disikapi secara serius.
				Karena perdagangan
				manusia merupakan
				kejahatan. Dan bisa
				meminta penjelasan dari
				Polda terkait tentang apa
				yang terjadi b. Tim Kuasa Korban Binomo:
				<ol> <li>Komisi III perlu menanyakan kepada Siber</li> </ol>
				Crime Mabes Polri sekeras
				apa usaha yang sudah
				dilakukan
				2) sudah ada dua orang yang
				ditahan oleh Mabes Polri.
				Itu menunjukkan bahwa
				keperpihakan polisi kepada
				masyarakat hadir di situ
				3) Harus tahu seberapa
				banyak orang yang
				menaruh uangnya di Indra
				Kenz, sehingga kita bisa
				mengetahui seberapa
				banyak aset yang dia kuasi
				dan dia miliki. Apakah
				ketika semua aset miliknya

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				dijual bisa mengganti kerugian yang dialami oleh masyarakat  4) DS sedang ditahan dan yang bersangkutan memiliki uang di rekeningnya 500 miliar. Kemudian lakukan penghitungan seberapa banyak korban yang mengalami kerugian  5) Seberapa banyak afiliator yang ada di Indonesia, kasih bocoran terkait hal itu. Sehingga bisa dilakukan upaya pencegahan agar tidak menimbulkan korban- korban lainnya  6) setuju jika aplikasi ini bisa diblokir dalam upaya mencegah korban-korban lainnya.

# LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

#### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

#### **B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN**

-

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RDPU dengan: - Penggiat Koro Pedang - Ketua Umum Koperasi Produsen Tempe Indonesia - PINSAR Unggas	<ul><li>a. Pelaksanaan undang- undang;</li><li>b. Pelaksanaan keuangan negara;</li><li>c. Kebijakan pemerintah</li></ul>	Membahas dan meminta masukan terkait dengan permasalahan pangan Nasional	
2.	RDPU dengan: - Himpunan Mitra Produksi Organik - KTNA - HKTI	<ul><li>a. Pelaksanaan undang- undang;</li><li>b. Pelaksanaan keuangan negara;</li><li>c. Kebijakan pemerintah</li></ul>	Membahas dan meminta masukan terkait dengan Permasalahan Pupuk	
3.	Kementerian Pertanian	<ul><li>a. Pelaksanaan undang- undang;</li><li>b. Pelaksanaan keuangan negara;</li><li>c. Kebijakan pemerintah</li></ul>	<ul> <li>a. Ketersediaan Pangan Menjelang Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional;</li> <li>b. Strategi peningkatan produksi pertanian Tahun 2022;</li> </ul>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	(	OBJEK PENGAWASAN		INFO SINGKAT	KETERANGAN
				d.	Tindak lanjut kunjungan kerja Komisi IV; Program Prioritas Tahun 2023; dan Isu-Isu aktual lainnya	
4.	Kementerian Kelautan dan Perikanan		Pelaksanaan undang- undang; Pelaksanaan keuangan	a. b.	Rapat Kerja Program dan Kegiatan tahun 2023 Stok/pasokan	
		c.	negara; Kebijakan pemerintah		ketersediaan Ikan menjelang hari besar (Hari Raya Idul Fitri)	
				c.	Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Reses Masa Sidang I-III tahun 2022-2023	
				d.	Isu-isu aktual	
5.	RDPU dengan: - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Perjuangan		Pelaksanaan undang- undang; Pelaksanaan keuangan	Per	enerima masukan terkait ngelolaan dan ngembangan sawit Rakyat	
	<ul><li>(Apkasindo Perjuangan)</li><li>Perkumpulan Forum Petani</li><li>Kelapa Sawit Indonesia (Popsi)</li></ul>	c.	negara; Kebijakan pemerintah			
	<ul> <li>Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR)</li> </ul>					
	<ul> <li>Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)</li> </ul>					

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

#### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

#### **B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN**

-

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RDPU dengan Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) NKRI Tgl. 16 Maret 2022	Konsultasi terkait eks PNPM		
2.	RDPU dgn DPRD Kab. Gorontalo Tgl. 16 maret 2022	Konsultasi mengenai pembangunan Infrastruktur dan transportasi	Komisi V DPR RI	
3.	RDPU dgn DPRD Kab. Mentawai Tgl 16 Maret 2022	Konsultasi mengenai pembangunan Infrastruktur dan transportasi	1. Pemerintah Daerah Kabupaten Mentawai untuk 10 tahun terakhir ini mengalokasikan 20% anggaran dari APBD untuk pembangunan infrastruktur jalan.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol> <li>Terdapat 393 KM Jalan Trans         Mentawai yang dirasa masih         sangat kurang, dkarenakan         pemerintah selama ini hanya         fokus pembangunan di Sebelah         Timur saja, sedangkan akses         Barat masih belum dilakukan,         mohon dukungan pemerintah         pusat.</li> <li>Program prioritas Pemerintah         Pusat dijanjikan Rp 715,5 miliar         namun hingga saat ini belum         terealisasi sebagaimana yang         diatur dalam Pepres No. 18         tahun 2020 tentang         pembangunan Jangka Menengah         Nasional, salah satu programnya         adalah Jalan Trans Mentawai.</li> <li>Komisi V DPR RI akan berupaya         menyampaikan usulan dalam         rapat bersama dgn Kementerian         PUPR semoga di tahun anggaran         2023 bisa terealisasi.</li> </ol>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	KUNFIK PENGAWASAN BIDANG PERHUBUNGAN 17 – 19 Maret 2022	<ul> <li>Peninjauan</li> <li>Pembangunan Kereta</li> <li>Cepat Jakarta –</li> <li>Bandung (Stasiun</li> <li>Padalarang);</li> <li>Optimalisasi/Pemanfa</li> <li>atan Bandara</li> <li>Kertajati;</li> <li>Jembatan Timbang</li> <li>(UPPKB) Balonggandu,</li> <li>Karawang</li> </ul>	Komisi V DPR RI meninjau secaa langsung progres pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung yang pembangunan fisiknya sudah mencapai 80%. Komisi V DPR RI meminta agar Bandara Kertajati dapat dimaksimalkan pemanfaatan dan penggunaan Bandara Kertajati. Komisi V DPR RI meminta agar Jembatan timbang Balonggantu dapat mengurangi kerusakan jalan dengan melakukan penindakan terhadap kendaraan yang Over Dimension dan Over Load.	
5.	RDP DENGAN KEPALA BMKG DAN KEPALA BNPP 21 Maret 2022	<ul> <li>Membahas Hapsem I 2021</li> <li>Membahas isu-isu bidang Basarnas dan BMKG antisipasi Perubahan Iklim dan tanggap darurat</li> </ul>	1. Komisi V DPR RI meminta BMKG dan BNPP (Basarnas) untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dan mengambil langkah-langkah preventif serta meningkatkan sistem pengendalian intern terhadap kinerja dan keuangan agar temuan-temuan dalam Hapsem I BPK Tahun 2021 tidak terulang kembali.  2. Komisi V DPR RI meminta BMKG untuk meningkatkan pengawasan atas perubahan	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			iklim global dan percepatan penyampaian informasi antara lain terkait cuaca ekstrem, gempa bumi, potensi tsunami, dan pasang surut air laut kepada masyarakat dan stakeholder terkait. a. Komisi V DPR RI meminta BNPP (Basarnas) untuk terus meningkatkan perlengkapan peralatan SAR serta partisipasi dan pelatihan terhadap segenap potensi SAR dalam rangka mendukung berbagai upaya pencarian dan pertolongan.	
6.	RDPU DENGAN DPP ASOSIASI PEMERINTAH DAERAH SELURUH INDONESIA (DPP APDESI) 22 Maret 2022	Permohonan audiensi terkait Perpres No. 104/2021		
7.	RDP dengan Deputi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Tgl. 23 Maret 2022	Membahas mengenai program kerja masing- masing Deputi Basarnas	Kesimpulan sbb.  1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi kepada BNPP (Basarnas) dalam TA 2021 untuk masing-masing Deputi.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			2. Terhadap program/kegiatan di TA 2021 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta Deputi Bina Tenaga dan Bina Potensi Pencarian dan Pertolongan; Deputi Sarana dan Prasarana Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan; dan Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan agar permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program/kegiatan TA 2021 harus segera diselesaikan, sehingga tidak terulang lagi pada TA 2022. 3. Komisi V DPR RI meminta Deputi Bina Tenaga dan Bina Potensi Pencarian dan Pertolongan; Deputi Sarana dan Prasarana Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan; dan Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan agar: a. Meningkatkan koordinasi internal dengan setiap Unit Organisasi Eselon I;	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
8.	KUNFIK PENGAWASAN BIDANG KEMENDES, PDTT, DAN TRANSMIGRASI 24 – 26 Maret 2022	- Meninjau BUMDes Pandowo Harjo, Ds Pandowo Harjo, Sleman. D.I. Yogyakarta; - Meninjau BUMDes Blulukan, Ds Colomadu, Karanganyar; - Meninjau Ds Wisata Karang Rejo, Borobudur Magelang.	b. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dan sisa anggaran yang kemungkinan belum terrealisasikan; c. Meningkatkan perlengkapan dan peralatan SAR dalam mendukung upaya pencarian dan pertolongan; d. Meningkatkan jumlah pelatihan potensi SAR di daerah; Komisi V DPR RI meninjau untuk melihat secara langsung mengenai bantuan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yaitu pembangunan Sarana Huniam Wisata (Sarhunta) dan infrastruktur desa wisata lainnya serta kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mendukung percepatan pembangunan di desa melalui BUMDes yang mandiri	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VI

#### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

#### **B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN**

-

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian	a. Pelaksanaan	Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan	Rapat Kerja
	Perdagangan RI	Undang-	Menteri Perdagangan RI. Rapat Kerja ini membahas	Komisi VI DPR
		Undang;	terkait harga komoditas dan pasokan barang	RI Dengan
		b. Pelaksanaan	kebutuhan pokok menjelang Ramadhan dan Hari	Menteri
		Keuangan	Raya Idul Fitri 2022 mendatang. Dalam Rapat Kerja	Perdagangan RI
		Negara;	ini, Komisi VI DPR RI meminta Kementerian	Kamis (17/3).
		c. Kebijakan	Perdagangan RI untuk melakukan tindakan yang	
		Pemerintah	antisipatif terkait perkembangan stabilisasi harga	
			dan pasokan Barang Kebutuhan Pokok menjelang	
			bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2022	
			serta melaporkan secara berkala kepada Komisi VI	
			DPR RI.	
			Tidak hanya itu, Komisi VI DPR RI juga mendesak	
			Kementerian Perdagangan RI untuk segera	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	DT DDA (Dave eve)	Dalalassassassassassassassassassassassass	berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri dan aparat penegak hukum dalam menjamin ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng di masyarakat serta menindak tegas para pelaku pelanggar hukum. Sementara itu, terkait dengan stabilisasi harga dan pasokan kedelai, gandum dan komoditas barang pokok lainnya, Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Perdagangan RI untuk segera melakukan intervensi pasar/subsidi dan melakukan diversifikasi sumber pasokan untuk mencegah kelangkaan komoditas impor dampak situasi global.	
2.	PT PPA (Persero)	<ul> <li>a. Pelaksanaan</li></ul>	Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR Panggil Kurator PT Kertas Leces  Senin (21/3) Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI direncanakan akan melakukan rapat dengan kurator PT Kertas Leces. Namun karena satu dan lain hal, pihak Kurator PT Kertas Leces tidak hadir. Ada pun rapat tersebut dihadiri oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (persero).  Di dalam rapat tersebut Komisi VI DPR RI mendapatkan penjelasan Direktur Utama PT	Rapat Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI dengan PT PPA (Persero)

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Perusahaan Pengelola Aset (Persero) terkait	
			kronologis permasalahan dan penanganan	
			kepailitan PT Kertas Leces (Persero).	
			Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN	
			Komisi VI DPR RI kemudian meminta PT	
			Perusahaan Pengelola Aset (Persero) untuk	
			meminta pendapat Kementerian Hukum dan HAM	
			terkait dengan biaya-biaya yang dapat diklaim oleh	
			kurator, di luar imbalan jasa bagi kurator.	
3.	Rapat Internal	a. Pelaksanaan	Komisi VI DPR RI Bentuk Panja Pangan dan Barang	Rapat Internal
	Komisi VI DPR RI	Undang-	Kebutuhan Pokok menyusul tidak stabilnya harga	Komisi VI DPR
	untuk	Undang;	pangan dan barang kebutuhan pokok di pasar.	RI, Senin 21
	membentuk Panja	b. Pelaksanaan	Panja ini dipimpin oleh Bapak M. Hekal. Usai	Maret 2022.
	Pangan dan	Keuangan	dibentuk, rencananya Komisi VI DPR RI akan	
	Kebutuhan Bahan	Negara;	segera melakukan rapat internal Panitia Kerja	
	Pokok.	c. Kebijakan	(Panja) Perdagangan Komoditas Ekspor dan segera	
		Pemerintah	menyampaikan hasil rekomendasi Panja	
4.	Panja BUMN	a. Pelaksanaan	Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI lakukan Rapat	Rapat Internal
	Energi Komisi VI	Undang-	Internal.	Komisi VI DPR
	DPR RI lakukan	Undang;		RI, Selasa 22
	Rapat Internal.	b. Pelaksanaan	Selasa (22/3) Setiap negara maju memiliki industri	Maret 2022.
		Keuangan	dan industri tak dapat dipisahkan dengan energi.	
		Negara;	Permintaan dunia akan energi terus menerus	
			meningkat, disertai dengan usaha menggebu-gebu	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		c. Kebijakan	untuk berhemat karena harganya yang tinggi. Selain	
		Pemerintah	energi yang selama ini sudah dikenal, muncul	
			tuntutan untuk menemukan sumber energi baru	
			dan terbarukan. Untuk itu, Panja BUMN Energi	
			Komisi VI DPR RI mendorong kesiapan BUMN Energi	
			melakukan transformasi menghadapi trend global ke	
			arah energi Non-Fosil melalui antara lain dengan	
			cara diversifikasi bahan baku pemanfaatan Biogas	
			dan Biodiesel dari sumber-sumber energi	
			terbarukan, maka Panja BUMN Energi, setelah	
			melakukan pendalaman dan mendengarkan aspirasi	
			masyarakat, memberikan rekomendasi sebagai	
			berikut; a). Mendukung upaya transformasi BUMN	
			Energi dari perusahaan penyedia energi	
			konvensional menuju perusahaan Energi Non-	
			Konvensional, terutama PLN dalam upaya	
			mewujudkan Ketahanan Energi Nasional yang	
			bertujuan mencukupi kebutuhan energi dan tenaga	
			listrik; b). Panja BUMN Energi mendorong	
			pemerintah Menyusun Peta Jalan BUMN Energi ber-	
			Transformasi Menuju Energi Terbarukan yang	
			memuat perencanaan, pengelolaan proses transisi	
			dari energi fosil menuju non-fosil, termasuk	
			kemungkinan ditingkatkannya peran swasta (non-	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			PLN) didalam penyediaan ketenagalistrikan berbasis energi baru terbarukan.  Tidak hanya itu, Panja BUMN Energi juga Mendukung program Blending Bahan Bakar Biodiesel B30 yang dinilai penting dan strategis mengingat trend global yang mempunyai kecenderungan perubahan dari energi fosil (minyak bumi, gas bumi dan batubara) menjadi energi nonfosil yaitu sumberdaya alam yang berlimpah misalnya tenaga matahari, tenaga air, tenaga angin	
5.	Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)	a. Pelaksanaan Undang- Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara;	dan tenaga panas bumi.  Dalam RDPU bersama APLI, APLI mengadukan permasalahan yang tengah marak dan mencoreng nama perusahaan anggota APLI yang menjual di E-Commerce. Sekjen APLI mengatakan permasalahan tersebut menghadapi dilema karena tadinya merupakan bisnis yang prospektif namun karena	RDPU Komisi VI DPR RI dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
		c. Kebijakan Pemerintah	adanya fenomena banyaknya kasus terkait dengan robot trading maka berdampak negative.  Selama ini APLI telah menjalankan sistem MLM selama 38 tahun karena melarang penggunaan skema PONZI. Tapi akhir-akhir ini pemerintah melalui Kementerian Perdagangan merubah aturan,	Selasa, 22 Maret 2022.

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			yang tadinya skema PONZI dilarang di APLI namun saat ini bisa dilakukan APPLI. APLI meminta Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai aturan trading robot karena robot ini digunakan menjadi alattrading yang berbentuk software dengan sistem algoritma. Seharusnya izin. Ada kekosongan hukum yang mengatur dengan robot trading ini karena robot ini digunakan sebagai money game. Sistem ini digunakan untuk money game dengan kamuflase trading paadahal ini bukan real trading tapi penipuan/permainan yang merugikan jaringan MLM dari perusahaan anggota APLI. Menurut APLI, Robot Trading menjual sistem (PONZI) bertentangan dan melanggar hukum karena tidak adil. APLI meminta Komisi VI melarang praktik skema PONZI. Semua produk yang dijual dengan sistem APLI harus mempunyai SIUPL, yang mengeluarkan usaha adalah Dirjen Bina Usaha. Agar Komisi VI menyampaikan kepada regulator dibuat kejelasan definisi mengenai trading Robot.	
6.	BAPPEBTI Dan PT	a. Pelaksanaan	Dalam RDPU ini diputuskan Komisi VI DPR RI	Kamis(24/3)
	Kliring Berjangka	Undang-	mendukung Badan Pengawas Perdagangan	Komisi VI DPR
	Indonesia	Undang;	Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk memperkuat	RI lakukan
	(Persero)		peran prioritasnya dalam melakukan pengawasan	Rapat Dengar

NO	INSTITUSI		KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		b.	Pelaksanaan	perdagangan berjangka komoditas, perdagangan	Pendapat (RDP)
			Keuangan	digital dan penanganan perkembangan isu baru	dengan Kepala
			Negara;	perdagangan. Dan juga meminta Badan Pengawas	Badan
		c.	Kebijakan	Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)	Pengawas
			Pemerintah	bekerjasama dengan Ditjen Perdagangan Dalam	Perdagangan
				Negeri untuk lebih meningkatkan pengawasan dan	Berjangka
				pengamatan terhadap modus-modus baru yang	Komoditi
				sedang berkembang, membangun call center	(BAPPEBTI Dan
				sebagai tempat pengaduan masyarakat, dan	Direktur Utama
				memberikan sanksi yang tegas terhadap	PT Kliring
				penyelewengan yang terjadi, termasuk pelarangan	Berjangka
				penjualan langsung (direct selling) dalam market	Indonesia
				place.	(Persero).
				Tidak hanya itu, Komisi VI DPR RI juga meminta	
				Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	
				(Bappebti) untuk melakukan penguatan regulasi	
				terkait dengan digital trading seperti Robot Trading	
				dan aset kripto, perlindungan investor/pelanggan	
				aset kripto dalam bursa fisik aset kripto dan	
				regulasi tentang penasehat berjangka serta bursa	
				aset Crypto, serta Komisi VI DPR RI meminta	
				Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	
				(Bappebti) untuk melakukan koordinasi antara	
				Kementerian/Lembaga dan aparat penegak hukum.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7.	Kementerian	a. Pelaksanaan	Komisi VI DPR RI Rapat Bahas Stabilisasi Harga	Rapat Dengar
	Perdagangan, PT	Undang-	Pangan dan Bahan Pokok	Pendapat
	Rajawali	Undang;		Komisi VI DPR
	Nusantara	b. Pelaksanaan	Kamis (24/3) Komisi VI DPR RI gelar Rapat Dengar	RI dengan
	Indonesia	Keuangan	Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perdagangan Dalam	Direktur
	(Persero), PT	Negara;	Negeri Kementerian Perdagangan Republik	Jenderal
	Perum Bulog.	c. Kebijakan	Indonesia, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara	Perdagangan
		Pemerintah	Indonesia (Persero) dan Direktur Utama Perum	Dalam Negeri,
			Bulog. Dalam RDP ini membahas terkait stabilisasi	Kementerian
			harga pangan dan bahan pokok, serta kesiapan	Perdagangan
			bahan pokok dalam menghadapi bulan Ramadhan	RI. Direktur
			dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2022/1443 H.	Utama PT
				Rajawali
			Komisi VI DPR RI menilai bahwa dasar hukum dari	Nusantara
			Penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian RI	Indonesia
			Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Minyak	(Persero) dan
			Goreng Curah Untuk Kebutuhan Masyarakat,	Direktur Utama
			Usaha Mikro, Dan Usaha Kecil Dalam Kerangka	PT Perum
			Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana	Bulog. Kamis,
			Perkebunan Kelapa Sawit, tidak sesuai dengan	24 Maret 2022.
			amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun	
			2014 tentang Perdagangan bahwa ruang lingkup	
			Jasa Distribusi merupakan lingkup dari	
			Perdagangan. Oleh karena itu Komisi VI DPR RI	
			akan mempertanyakan mengenai hal ini dalam	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Rapat Kerja dengan Menteri Pedagangan RI pada masa sidang ini.	
			Komisi VI DPR RI juga meminta kepada	
			Kementerian Perdagangan agar memiliki mitigasi	
			risiko jangka pendek, menengah dan panjang yang	
			akan dijalankan pemerintah serta dilaporkan kepada Komisi VI DPR secara berkala, dalam	
			mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan	
			sehingga dapat mencapai titik harga keseimbangan	
			yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.	
			yang terjangkau oleh daya ben masyarakat.	
			Tidak hanya itu, Komisi VI DPR RI meminta Dirjen	
			Perdagangan Dalam Negeri Kementerian	
			Perdagangan RI, PT Rajawali Nusantara Indonesia	
			(Persero) dan Perum Bulog agar mengawasi	
			keberadaan stok, distribusi dan stabilitas harga	
			pangan dan bahan pokok, khususnya dalam	
			menghadapi bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul	
			Fitri Tahun 2022/1443 H	
8.	Kementerian	a. Pelaksanaan	Komisi VI DPR RI melakukan Rapat Dengar	Komisi VI DPR
	Perdagangan RI	Undang-	Pendapat dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri	RI Rapat
	dan Produsen	Undang;	Kemendag RI dan RDPU dengan Dirut PT Bina	Dengar
	Minyak Goreng		Karya Prima dan Dirut PT Masa Depan Cerah	Pendapat
	Indonesia		terkait pembahasan mengenai Kelangkaan minyak	dengan Dirjen

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		b. Pelaksanaan	goreng, Kamis (24/3). Pada rapat tersebut, Komisi	Perdagangan
		Keuangan	VI DPR RI mengapresiasi PT Bina Karya Prima dan	dalam negeri
		Negara;	PT Masa Depan Cerah atas kehadirannya di dalam	Kemendag RI
		c. Kebijakan	Rapat Dengar Pendapat Umum ini, serta meminta	dan RDPU
		Pemerintah	agar berperan secara maksimal dalam memastikan	dengan Dirut
			rantai pasokan minyak goreng mulai dari produksi	PT. Bina Karya
			hingga distribusi. Selain itu, Komisi VI DPR RI	Prima dan Dirut
			meminta kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri	PT. Masa Depan
			Kementerian Perdagangan RI agar melakukan	Cerah terkait
			pengawasan dan pengawalan yang ketat dalam	Pembahasan
			rangka pelaksanaan pengendalian distribusi dan	mengenai
			stabilisasi harga minyak goreng curah dengan HET	Kelangkaan
			serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum	Minyak Goreng,
			untuk menertibkan pelaksanaan pengendalian	Kamis, 24
			distribusi dan stabilisasi harga minyak goreng	Maret 2022.
			curah dengan HET.	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

#### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

#### **B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN**

-

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	a. Menteri Pertanian b. Menteri Perdangan c. Menteri ESDM d. Menteri Perindustrian	<ul> <li>a. Pelaksanaan undang- undang;</li> <li>b. Pelaksanaan Keuangan Kegara;</li> <li>c. Kebijakan Pemerintah</li> </ul>	<ul> <li>a. Efektifitas neraca komoditas dalam pengendalian harga pangan pokok</li> <li>b. Neraca Pangan, kenaikan harga dan kesiapan dalam menghadapi bulan puasa</li> <li>c. Tata kelola kebijakan pupuk (subsidi dan non subsidi)</li> <li>d. Pasokan dan harga gas untuk industry pupuk</li> </ul>	
2.	<ul> <li>a. Dirjen EBTKE KESDM RI</li> <li>b. Dirut PT Geo Dipa Energi (Persero) c. PT Sorik Marapi Geothermal Power</li> </ul>	<ul> <li>a. Pelaksanaan undang- undang;</li> <li>b. Pelaksanaan keuangan Negara;</li> <li>c. Kebijakan Pemerintah</li> </ul>	a. Penjelasan kejadian kebocoran gas dan keracunan gas beracun (H <sub>2</sub> S, SO <sub>2</sub> ) masyarakat sekitar lokasi	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul><li>b. Upaya penanggulangan</li><li>dan pencegahan agar</li><li>tidak terjadi lagi</li><li>c. Lain lain</li></ul>	
3.	<ul> <li>a. Dirut PT Inalum (Persero)</li> <li>b. Dirut PT Antam, Tbk</li> <li>c. Dirut PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk</li> <li>d. Dirut PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI)</li> </ul>	<ul><li>a. Pelaksanaan undang- undang;</li><li>b. Pelaksanaan Keuangan Kegara;</li><li>c. Kebijakan Pemerintah</li></ul>	<ul><li>a. Progres Pembangunan</li><li>Smelter Mempawah</li><li>b. Lain-lain</li></ul>	
4.	Direktur Utama PT PLN (Persero)	<ul> <li>a. Pelaksanaan undang- undang;</li> <li>b. Pelaksanaan Keuangan Negara;</li> <li>c. Kebijakan Pemerintah</li> </ul>	<ul> <li>a. Kendala dan tantangan sistem kelistrikan Tahun 2022</li> <li>b. Proses kerjasama pembangkit listrik EBT</li> <li>c. Dampak Permen ESDM No. 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap</li> <li>d. Potensi Kerugian PLN dengan Kenaikan Harga Batubara di Pasar Global</li> <li>e. Lain lain</li> <li>Catatan: menyampaikan RKP 2022</li> </ul>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI)	<ul><li>a. Pelaksanaan undang- undang;</li><li>b. Pelaksanaan Keuangan Negara;</li><li>c. Kebijakan Pemerintah</li></ul>	<ul><li>a. Penjelasan tentang proses pencabutan izin usaha pertambangan nikel</li><li>b. Lain-lain</li></ul>	
6.	<ul> <li>a. Dirut PT Beton Jaya Manunggal</li> <li>b. Dirut PT Ispat Indo</li> <li>c. Dirut PT Gunawan Dianjaya Steel</li> <li>d. Dirut PT Toyogiri Iron Steel</li> <li>e. Dirut PT Gunung Raja Paksi, Tbk.</li> </ul>	a. Pelaksanaan undang- undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Tata niaga industri baja b. Kebutuhan pasokan gas c. Lain-lain	
7.	Kepala BRIN	<ul><li>a. Pelaksanaan undang- undang;</li><li>b. Pelaksanaan Keuangan Negara;</li><li>c. Kebijakan Pemerintah</li></ul>	<ul> <li>a. Penjelasan dan perkembangan evaluasi program kerja BRIN Tahun 2021</li> <li>b. Penjelasan program kerja BRIN Tahun 2022</li> <li>c. Penjelasan dan perkembangan kelembagaan BRIN</li> <li>d. Lain-lain</li> </ul>	
8.	Kunjungan Kerja Spesifik pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021- 2022	<ul><li>a. Pelaksanaan undang- undang;</li><li>b. Pelaksanaan Keuangan Negara;</li></ul>	Kunjungan kerja spesifik ke:  a. Provinsi Bangka Belitung Peninjauan sektor Pertambangan Timah	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		c. Kebijakan Pemerintah	b. Provinsi Jawa Barat Peninjauan ke Pabrik Minyak Goreng Sunco PT Mikie Oleo Nabati Inustri Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi c. Provinsi Sulawesi Tenggara Peninjauan Pertambangan do Konawe Utara	
9.	Ketua Tim Advokasi Hak Masyarakat Adat Intan Jaya Papua	<ul> <li>a. Pelaksanaan undang- undang;</li> <li>b. Pelaksanaan Keuangan Negara;</li> <li>c. Kebijakan Pemerintah</li> </ul>	Audiensi Terkait Eksploitasi Tambang Emas di Blok Wabu Intan Jaya Provinsi Papua	
10.	Perwakilan Masyarakat Pemajuan Iptek dan Inovasi Nasional,		Audiensi Terkait Penyampaian Keprihatinan terhadap BRIN	

# LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

#### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

#### **B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN**

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Agama RI	Rapat Panja Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengenai komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 M	Dari penjelasan Dirjen     PHU Kementerian Agama     RI diketahui bahwa     komponen BPIH Tahun     1443 H/2022 M dengan     memasukan biaya     pemenuhan Protokol     Kesehatan di masa     pandemi Covid-19 baik di     dalam negeri maupun di     Arab Saudi rata-rata     sebesar Rp89,2juta,     dengan Bipih atau biaya     yang dibayar langsung     oleh jamaah sebesar     Rp45juta dan biaya yang     bersumber dari nilai     manfaat haji sebesar     Rp44,2juta.	Kepastian mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M masih menunggu konfirmasi dari Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Pusat Kesehatan Haji	• Rapat Panja Komisi VIII DPR RI	Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH dan Dirjen PHU Kemenag RI menargetkan penetapan dan pengesahan besaran BPIH Tahun 1443 H/2022 M selambat-lambatnya tanggal 11 April 2022.      Puskes Haji Kemenkes RI	Penetapan
	Kementerian Kesehatan RI, Dirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, PT. Garuda, PT. Saudi Airlines, PT. Angkasa Pura I dan II, PT. AirNav Indonesia dan PT. Pertamina,	dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengenai komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 M	Protokol Kesehatan pada keberangkatan tidak diterapkan test PCR, namun pada kepulangan diterapkan protokol kesehatan sesuai SE Kasatgas Penanganan Covid-19 Nomor 12 Tahun 2022 yaitu diterapkan dua kali test PCR, satu kali di Arab Saudi dan satu kali pada saat kedatangan di Embarkasi dan diterapkan karantina 1 (satu) hari di Asrama Haji. Kebijakan tersebut bersifat dinamis dan memungkinkan terjadi	komponen BPIH masih menunggu kuota haji Indonesia dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			perubahan. Terkait biaya PCR dan karantina akan dibahas bersama Kementerian Kesehatan RI secara khusus.  • Kewajiban vaksinasi untuk jemaah haji mencakup dua jenis vaksinasi, yaitu vaksinasi meningitis dan Covid-19 dengan dosis lengkap.  • Total anggaran kesehatan haji tahun 2022 sebesar Rp327,67 miliar, dialokasikan untuk pengadaan obatobatan dan alat kesehatan, vaksin meningitis, operasional Klinik Kesehatan Haji Indonesia, dan Penugasan Tenaga Kesehatan Haji.  • Telah disiapkan Tenaga Kesehatan Haji Indonesia sebanyak 1.832 orang yang terdiri dari: 1.521	
			tenaga kesehatan kloter	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			dan 311 untuk PPIH di Arab Saudi (dengan asumsi kuota penuh seperti tahun 2019).  • Melakukan integrasi aplikasi PeduliLindungi	
			dan Tawakkalna milik Arab Saudi. 2. Dirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Perhubungan	
			Darat  • Direktur Udara  Direktorat Jenderal  Perhubungan Udara  Kementerian	
			Perhubungan RI telah menetapkan rencana 7 embarkasi untuk pelayanan penyeleng- garaan ibadah haji.	
			Direktorat Jenderal     Perhubungan Darat     Kementerian     Perhubungan RI	
			menyiapkan <i>supporting</i> system pada penyelenggaraan ibadah	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			haji, yang pada teknisnya ditempatkan 3 (tiga) orang dari Ditjen Hubdat untuk mengawasi pelayanan transportasi darat di Arab Saudi. 3. PT. Garuda Indonesiasedang melakukan simulasi dengan skenario 30 persen dan 50 persen dari total kuota Jamaah Haji (Dari Kuota Total Jamaah Haji Garuda Indonesia periode Haji Tahun 2019). 4. PT. Saudia Airlines menyampaikan mengenai kesiapan dalam persiapan bidang penerbangan haji dengan asumsi kuota 100%, 50%, dan 30%: terdapat dua gelombang keberangkatan yaitu Gelombang I menuju	
			Madinah dan Gelombang II menuju Jeddah serta	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT KETERANGAN
			melayani 5 embarkasi haji:
			Palembang, Batam,
			Cengkareng Jakarta,
			Kertajati, dan Surabaya.
			Selain itu telah siap
			melayani embarkasi-
			antara.
			5. PT. Angkasa Pura I
			menyampaikan mengenai
			besaran biaya persentase
			aero charge perbandingan
			pada penerbangan haji
			tahun 2019 berada di
			kisaran biaya antara
			Rp202.269 (Solo) hingga
			Rp310.505 (Makassar dan
			Surabaya) atau rata-rata
			sebesar 0.68% dari total
			biaya haji.
			6. PT. Angkasa Pura II
			menyampaikan komponen
			biaya Passanger Service
			Charge adalah sebesar
			75.000 per jemaah dan
			persentase biaya airport
			terhadap biaya airlines

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT KETERANGAN
			adalah sebesar rata-rata 0.57% per jemaah. 7. PT. AirNav Indonesia menyampaikan mengenai besaran biaya navigasi penerbangan haji tahun 2019 berada di kisaran biaya rata-rata sebesar Rp31.093 / jemaah (Aceh) hingga Rp222.049 / jemaah (Makassar) atau sebesar 0.494% dari total biaya haji tahun 2019 dengan total biaya yang menjadi pendapatan Airnav Rp 38.2 M. 8. PT. Pertamina menyampaikan konsumsi Avtur pada masa penerbangan haji meningkat sebesar 5 % per tahun antara Tahun 2015- 2019 dan estimasi range harga avtur di bandara CGK: Rp.11.178 - Rp.15.634 per liter.

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	Masukan untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M	<ul> <li>Dana kelolaan sebesar Rp158 Triliun atau 101,83 persen dari target tahun 2021.</li> <li>Pendaftaran calon jemaah haji baru sebanyak 270.534 jamaah atau 79 persen dari target 2021.</li> <li>Nilai manfaat sebesar Rp10,51 Triliun atau 113.62 persen dari target 2021.</li> <li>Realisasi virtual account sebesar Rp2,5 Triliun.</li> <li>Penyaluran program kemaslahatan sebesar Rp180.63 Miliar atau 93.11 persen dari target 2021.</li> <li>Penggunaan biaya operasional BPKH sebesar Rp210,55 Miliar atau 58,88 persen dari pagu tahun 2021.</li> </ul>	Pembahasan lebih lanjut mengenai BPIH Tahun 1443 H/2020 M masih menunggu kota haji Indonesia dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Pansel Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	Seleksi Calon Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH Periode 2022- 2027.	<ul> <li>Komisi VIII DPR RI meminta Pansel tidak hanya menyeleksi calon Anggota BPKH dari kalangan akademisi tetapi juga dari kalangan praktisi keuangan dan entrepreneur untuk memaksimalkan nilai manfaat dari pengelolaan keuangan haji.</li> <li>Anggota BPKH yang akan datang harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai keuangan, management risiko dan ekosistem investasi.</li> <li>Anggota BPKH yang akan datang harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga dapat menjelaskan kepada public mengenai pengeloaan keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH.</li> </ul>	Presiden akan menyerahkan 10 nama calon Anggota Dewan Pengawas BPKH Periode 2022-2027 untuk menjalani fit and proper test di Komisi VIII DPR RI

4.	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Bandung (Jabar), Solok (Sumbar) dan Banjarmasin (Kalsel)	Kesiapsiagaan bencana, penyaluran bantuan sosial dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan.	<ul> <li>Komisi VIII DPR RI ingin memastikan bahwa upaya kesiapsiagaan bencana perlu terus dilakukan untuk meminimalisir jumlah korban jiwa dan harta apabila terjadi bencana di tengah tingginya intensitas hujan belakangan ini.</li> <li>Komisi VIII DPR RI ingin memastikan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat prasejahtera dan masyarakat yang terdampak Covid-19 benar-benar tepat sasaran.</li> <li>Komisi VIII DPR RI ingin memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan keagamaan di tengah tingginya penyebaran varian baru Omicron dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan cluster baru.</li> </ul>	
----	--	--	---	--

# LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

#### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	Panja menugaskan tim asistensi untuk mempersiapkan pendalaman substansi RUU sesuai masukan anggota Panja.	Tidak ada kegiatan Panja	Panja akan melakukan pembahasan draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan pada Masa Persidangan IV TS 2021-2022.

#### **B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN**

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian/Lembaga	Rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran.	Tidak ada	••••
2.	Badan Anggaran	<ul><li>a. Pembahasan alokasi anggaran kementerian/lembaga;</li><li>b. Pembahasan RUU Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.</li></ul>	Tidak ada	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Tanggal 22 dan 23 Maret 2022 Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI	Membahas pergeseran Pagu Alokasi Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2022 sesuai Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja kementerian Kesehatan. Program Kerja Kementerian Kesehatan RI Tahun 2022;	1. Komisi IX DPR RI telah menerima penjelasan Menteri Kesehatan RI atas pergeseraa Pagu Aloksi Tahun Anggaran 2022 sesuai perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Kesehatan RI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022. Untuk itu Komisi IX DPR RI memerikan persetujuan atas: a. pergeseran Pagu Alokasi Anggaran antar Eselon I yang tidak terjadi pergeseran antar program; dan b. pergeseran Pagu Alokasi Anggaran antar program di dalam lingkup Eselon I.  2. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk menyerahkan rincian pergeseran Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2022, palimg lambat 30 Maret 2022.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Tanggal 23 Maret 2022, Rapat Panja tentang Pengawasan Vaksin COVID-19 dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PKCPEN), Menteri Kesehatan RI, Menteri BUMN RI	<ul> <li>Strategi dan kebijakan vaksinasi (termasuk kebijakan vaksinasi anak, lansia, dan booster) sebagai salah satu upaya penanggulangan COVID-19;</li> <li>Penjelasan singkat persiapan pemerintah dalam masa transisi 68ocial68y menuju 68ocial68 COVID-19.</li> </ul>	Komisi IX DPR RI menerima dan mengapresiasi masukan dari Menteri Kesehatan RI dan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi KPCPEN, selanjutnya akan menjadi bahan masukan bagi Panja Komisi IX DPR RI tentang Pengawasan Vaksin COVID-19 dalam 68ocial68y laporan akhir panja.	
3.	Tanggal 21 Maret 2022 Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Ketenagakerjaan RI; Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN); Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan;	Membahas Kesiapan dan Sosialisasi penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, baik dari segi anggaran dan pendataan kepesertaan sebagaimana amanat PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP); dan	Hasilnya; 1. Komisi IX DPR RI mendesak kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk:  • Menjamin perlindungan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami pemutusan hubungan kerja, untuk	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan	Implementasi dan evaluasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.	<ul> <li>menerima Jaminan Kehilangan Pekerjaan;</li> <li>Mengupayakan keberlangsungan program JKP di masa yang akan datang;</li> <li>Segera menyelesaikan revisi peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perlindungan Program Jaminan Hari Tua dengan mengedepankan dialog dan sosialisasi;</li> <li>Memastikan keterbukaan penentuan penyelenggara pelatihan pekerja dalam progam JKP serta Program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan 69ocial69y (link and match) serta pemerataan sebaran di seluruh wilayah Indonesia; dan</li> <li>Memastikan terselenggaranya perlindungan jaminan 69ocial kepada Pekerja Migran Indonesia.</li> </ul>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol> <li>Komisi IX DPR RI mendesak         Direksi BPJS Ketenagakerjaan         untuk:         <ul> <li>Melakukan koordinasi                 terhadap singkronisasi data                yang dipublikasikan;</li> <li>Meningkatkan kerja sama                 dengan stakeholder                 pariwisata dalam perluasan                 kepesertaan BPJS                Ketenagakerjaan;</li> <li>Menjalankan rekomendasi                 Dewan Jaminan Sosial                 Nasional kepada BPJS                 Ketenagakerjaan.</li> <li>Meningkatkan perluasan                 kepesertaan BPJS                 Ketenagakerjaan secara                 maksimal.</li> <li>Meningkatkan kerja sama                 dengan Bank Pembangunan                  Daerah dalam bentuk                      penempatan dana sebagai                       upaya pelaksanaan Inpres                       No. 2 Tahun 2021 Tentang                       Optimalisasi Pelaksanaan</li></ul></li></ol>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol> <li>Komisi IX DPR RI mendorong Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk meningkatkan kajian dan rekomendasi kepada Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Menteri Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan perlindungan jaminan 71social ketenagakerjaan.</li> <li>Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk menyampaikan Iaporan pengawasan pelaksanaan Program Jaminan Sosial yang dilaksanakan oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan berbasis data pengawasan.</li> </ol>	
4.	Tanggal 23 Maret 2022 Rapat Dengan Pendapat dengan Ketua Ombudsman RI, Diretktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan, dan	Memabahas 1. Regulasi Investasi BJPS Ketenagakerjaan; 2. Strategi Investasi dalam rangka optimalisasi	Hasilnya Menerima masukan dari para stakeholder yang diundang tentang Regulasi Investasi BJPS Ketenagakerjaan; Strategi Investasi dalam rangka	
	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar investasi Dr. Yanuar Ricky dan Prof. Dr. Adler Haymas	kemanfaatan dana iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan; dan	optimalisasi kemanfaatan dana iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan; dan Evaluasi dan masukan sehubungan dengan	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Manurung Panja Kepesertaan dan Kemanfaatan BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI	3. Evaluasi dan masukan sehubunan dengan kemanfaatan investasi BPJS Ketenagakerjaan	kemanfaatan investasi BPJS Ketenagakerjaan	
5.	Tanggal 24 – 26 Maret 2022 Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Kesiapan dan Sosialisasi Program Jaminan Kehilangan Kehilangan Pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI	Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Kesiapan dan Sosilalisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan ke Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur; Kota Boyolali Provinsi Jawa Tengah; dan Kab. Tangerang Provinsi Banten	<ul> <li>Hasil Kunjungan Kerja:</li> <li>A. Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur</li> <li>1. Kunjungan Kerja Spesifik ke Kab. Sidoarjo Jawa Timur</li> <li>Penduduk bekerja di Jawa Timur mencapai 14.796.353, terdiri dari penerima upah, bukan penerima upah dan peserta jasa konstruksi.  Berdasarkan kepesertaan, jumlah pekerja yang dicover jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, mencapai 26,77 persen.</li> <li>Dalam pelaksanaan Program JKP BPJS Ketenagakerjaan, di Jawa Timur, terdapat 1,3 juta pekerja yg berpotensi menjadi peserta. Hingga saat ini, telah diberikan JKP kepada 52 pekerja. Hari ini</li> </ul>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			ada 3 yg terkena PHK berhak menerima JKP, dan smtr sisanya dari 166 pekerja masih dalam proses untuk memperoleh perlindungan JKP BPJS Ketenagakerjaan.  • Kolaborasi sosialisasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dg Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Serikat Pekerja, sudah berjalan dengan koordinasi yang baik untuk mewujudkan negara hadir untuk peserta yang berhak menerima JKP.  • Dibutuhkan dukungan kebijakan pemerintah agar pengawasan kepatuhan perusahaan dan pekerja dapat memperluas kepesertaan Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			B. Kota Boyolali Jawa Tengah  1. Masih banyak perusahaan di kabupaten Boyolali yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan termasuk dalam keseluruhan program yaitu JKK, JKM, JHT, dan JP.  2. Sosialisasi program JKP belum dilaksanakan secara massif. Hal ini disampaikan oleh pekerja dimana masih banyak pekerja yang belum mengetahui adanya program JKP.  3. Pemerintah kabupaten Boyolali belum membuat perencanaan dan pengalokasian anggaran untuk sosialisasi program JKP tahun 2022. Adapun sosialisasi yang dilakukan selama ini menggunakan anggaran pemerintah pusat, Pemerintah provinsi dan	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			4. Melihat banyaknya data pekerja yang di PHK dari dinas ketenagakerjaan yaitu mencapai hampir 18% namun tidak ada satupun yang mendapatkan atau mengajukan manfaat program JKP  5. Berdasar data BPJS TK, jumlah pekerja yang eligible menjadi peserta program JKP mencapai 24.755 orang atau hampir 40% dari jumlah pekerja di Kabupaten Boyolali. Namun belum mengajukan manfaat klaim JKP karena belum ada kasus PHK yang dilaporkan oleh perusahaan maupun pekerja.  6. Belum adanya peserta JKP yang mengklaim manfaat JKP, salah satunya karena pemerintah tidak transparan	
			dalam melaporkan pekerja yang Ter PHK. Bahkan yang	
			terjadi, perusahaan	
			melaporkan pekerja yang Ter PHK sebagai pekerja yang	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			berhenti bekerja karena keinginan sendiri.  7. Ada permintaan dari pekerja terkait penyederhanaan atau simplifikasi persyaratan bagi pekerja yang terdaftar menjadi peserta program JKP, sehingga lebih memudahkan proses pengajuan klaim.  8. Kesulitan lain dalam pemenuhan persyaratan bagi peserta yang akan mengklaim manfaat JKP adalah ketika dibutuhkan bukti dari putusan pengadilan PHI. Dimana di kabupaten Boyolali dg jumlah pekerja yang banyak, tidak ada pengadilan PHI.	
			<ul> <li>C. Kabupaten Tangerang Banten</li> <li>1. Kunjungan Kerja Spesifik ke Kab. Tangerang Provinsi Banten</li> <li>Di Kabupaten Tangerang jumlah perusahaan yang terdaftar berjumlah 5.251 perusahaan dengan pekerja formal berjumalh 957.624</li> </ul>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			tenagakerja dan pekerja informal berjumlah 399.526 tenagakerja. Kepesertaan Aktif JKP di Wilayah Banten 834.282 pekerja, khusus di Kabupaten Tangerang berjumlah 147.376 pekerja. Adapun penerima manfaat program JKP untuk wilayah Banten 8 orang dan 1 orang khusus di wilayah Kabupaten Tengerang.  Sosialisasi Program JKP ke Serikat Pekerja baru 1 kali dilakukan, dengan jumlah 3 konfeserasi, 22 federasi dan 13 serikat buruh non federasi di Kabupaten Tangerang diharapkan BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker agar lebih massif melakukan sosialisasi program JKP Pemprov Banten dan Pemkab Tangerang mengharapkan kemenaker RI mengharapkan agar BLK di Provinsi Banten dan BLK di Kabupaten Tangerang dapat menjadi	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			bagian dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) program JKP.	
			2. Komisi IX DPR RI mendesak agar Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan meninjau kembali perencanaan perhitungan anggaran program JKP jangka panjang saat pemerintah tidak memberikan kembali subsidi dengan memperhatikan perhitungan iuran rekomposisi tanpa merusak tatanan iuran program yang lainnya terutama program JKM dan JKK	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

#### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	RUU Praktik	Rapat Intern Panja	Persiapan rapat Panja.	
	Psikologi			
2	RUU Praktik	Rapat Panja	Membahas mengenai layanan dan profesi,	
	Psikologi	(Konsinyering)	terkait rumusan norma yang perlu	
			disempurnakan	

### **B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN**

\_

#### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	Kemenparekraf/Baparekraf RI	<ol> <li>Persiapan dan kesiapan pelaksanaan MotoGP Mandalika 2022.</li> <li>Pemulihan dan penguatan Parekraf.</li> </ol>	<ol> <li>Komisi X DPR RI mengapresiasi persiapan dan kesiapan pelaksanaan MotoGP Mandalika 2022.</li> <li>Komisi X DPR RI menekankan Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk menyampaikan perkembangan dampaknya pasca event tersebut dilaksanakan, utamanya dalam hal serapan tenaga kerja, keterlibatan pelaku parekraf, peningkatan kualitas produk ekraf, pelibatan aktif</li> </ol>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			masyarakat setempat, dan perhitungan kontribusi event MotoGP Mandalika 2022 terhadap perekonomian nasional dan daerah. 3. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk melakukan akselerasi strategi pemulihan dan penguatan Parekraf	
2	Kemendikbudristek dan Kemenpora RI	RDPU dengan  1. Komisi A DPRD Kabupaten Tapanuli Utara  2. Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat.  3. Komisi IV DPRDKabupaten Ketapang. Membahas dan menerima masukan mengenai:  1. Konsultasi dan Koordinasi tentang Permohonan Bantuan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Tempat Penyelenggaraan Olahraga pada PON XXI Tahun 2024 di Aceh-	Komisi X DPR RI memberikan penjelasan mengenai kebijakan yang mengenai olahraga dan Pendidikan.	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3	Kemendikbudristek RI	<ol> <li>Study banding/ berdiskusi mengenai RUU tentang Keolahragaan.</li> <li>Berdiskusi tentang penganggaran pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Tentemark di Dinas Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Ketapan</li> <li>Pelaksanaan kebijakan Kurikulum Merdeka</li> </ol>	Kunjungan kerja spesifik ke Kota Bandung, Kabupaten Bekasi-Jawa Bara, dan Kota Tangerang, dengan	Secara umum, kurikulum merdeka baru
			melakukan pertemuan bersama dinas pendidikan dan para pemangku kepentingan Pendidikan di daerah.	dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah penggerak. Adapun sekolah lainnya masih dalam proses sosialisasi dan persiapan.
4	Kemendikbudristek RI	RDPU dengan Forum Dosen SBM ITB dan Forum Orang Tua Mahasiswa SBM ITB, membahas permasalahan konflik pihak rektorat dengan Forum Dosen SBM ITB, terkait pencabutan swakelola SBM ITB	Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti dengan membahasanya bersama Kemendikbudristek RI	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5	Kemenpora RI	Raker, membahas kesiapan pelaksanaan Kalender <i>Event</i> Olahraga Tahun 2022 dari sisi teknis dan capaian prestasi.	Komisi X DPR RI mengapresiasi persiapan kalender even 2022 yang dilakukan Kemenpora, dengan menekankan agar memaksimalkan seluruh persiapan dan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi setiap even dan multieven olahraga,	
6	Kemendikbudristek RI	RDPU dengan Aliansi Penyelenggaran Pendidikan Indonesia dan Konsorsium Pendidikan Indonesia, membahas permohonan Penundaan Pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional yang diinisiasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.	Komisi X DPR RI akan mengkaji usulannya.	
7	Kemendikbudristek RI	RDP dengan Rektor ITB, membahas terkait Restrukturisasi ITB dan dampaknya terhadap SBM ITB.	Komisi X DPR RI melalui Kemendikbudristek RI mendorong ITB untuk segera menyelesaikan permasalahan secara internal mengingat setiap pemasalahan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan suatu perguruan tinggi merupakan permasalahan yang harus diselesaikan secara internal oleh ketiga entitas, yaitu Majelis Wali Amanah, Rektor, dan Senat Akademik	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
8	Kemendikbudristek RI	RDP dengan Plt Dirjen Dikti Kemendikbudristek RI, membahas terkait Restrukturisasi ITB dan dampaknya terhadap SBM ITB.	Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk menjembatani pertemuan Rektorat, Dosen dan orang tua mahasiswa sehingga permasalahan di ITB dapat diselesaikan secara internal	
9	Kemendikbudristek RI	RDPU Panja Kebijakan Kurikulum dengan Pakar dan organisasi profesi Pendidikan, membahas:  1. Sinkronisasi regulasi kebijakan Kurikulum Darurat, Kurikulum Prototipe, dan Kurikulum Merdeka dengan peraturan perundangan Pendidikan.  2. Pandangan terhadap Kebijakan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, dan rencana penerapan kurikulum Merdeka.	ja Kebijakan n dengan Pakar dan profesi Pendidikan, s: nisasi regulasi an Kurikulum t, Kurikulum ce, dan Kurikulum adengan peraturan angan Pendidikan. ngan terhadap tan Kurikulum dalam pemulihan ajaran, dan rencana pan kurikulum	
10	Kemendikbudristek RI	RDP Panja Formasi GTK PPPK dengan K/L terkait membahas Evaluasi hasil seleksi Guru PPPK dan kajian/skema penyelesaian formasi GTK PPPK.	Panja Formasi GTK PPPK Komisi X DPR RI mengevaluasi program satu juta PPPK, tahap 1 dan tahap 2 yang dilakukan pada tahun 2021, khususnya terkait permasalahan formasi.	

### LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XI

#### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

#### **B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN**

-

#### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan 8 (delapan) Calon Anggota BPK RI	Uji Kelayakan <i>(Fit and Proper Test)</i> Calon Anggota BPK RI	Delapan Calon Anggota BPK RI melakukan Uji Kelayakan <i>(Fit and Proper Test)</i> dan masing-masing Calon menyampaikan paparan di depan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI	Rapat tanggal 17 Maret 2022
2.	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan 5 (lima) Calon Anggota BPK RI	Uji Kelayakan <i>(Fit and Proper Test)</i> Calon Anggota BPK RI	Lima Calon Anggota BPK RI melakukan Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) dan masing-masing Calon menyampaikan paparan di depan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI	Rapat tanggal 18 Maret 2022
3.	Rapat Internal Komisi XI DPR RI	Pengambilan Keputusan atas Calon Anggota BPK RI	Pengambilan Keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak (voting)	Rapat tanggal 18 Maret 2022

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol> <li>Pemungutan suara dihadiri oleh 56 (lima puluh enam) orang Anggota Komisi XI DPR RI</li> <li>Hasil pemungutan suara terhadap Calon Anggota BPK RI sebagai berikut:         <ol> <li>Isma Yatun memperoleh 46 suara</li> <li>Haerul Suara memperoleh 37 suara</li> <li>Osbal Saragi Rumahorbo memperoleh 18 suara</li> <li>Dori Santosa memperoleh 11 suara</li> <li>9 (sembilan) Calon Anggota BPK yang lainnya tidak memperoleh suara</li> </ol> </li> <li>Berdasarkan hasil pemungutan suara, disepakati 2 (dua) orang Anggota BPK RI terpilih yaitu Ibu Isma Yatun dengan memperoleh 46 suara dan Bapak Haerul Saleh dengan memperoleh 37 suara.</li> </ol>	
4.	Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan	Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022	1. Direktur Jenderal Perbendaharaan agar memperkuat layanan perbendaharaan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan APBN melalui simplifikasi bisnis pelaksanaan anggaran, pengelolaan liquidity buffer, penyempurnaan	Rapat tanggal 21 Maret 2022

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			proses bisnis akuntansi dan pelaporan keuangan, implementasi Digipay dan platform pembayaran pemerintah, peningkatan kualitas tata pengelola keuangan pada K/L, pengembangan sistem monev pelaksanaan anggaran berbasis kinerja terintegrasi, implementasi peran regional chief economist, dan penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kualitas layanan BLU kepada masyarakat.  2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan terus melakukan penyempurnaan kebijakan terkait percepatan realisasi anggaran K/L dan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (spending better) melalui langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2022, monev pelaksanaan anggaran, simplifikasi kebijakan pelaksanaan anggaran dan reformulasi IKPA yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan pembangunan.	

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			3. Direktur Jenderal Perbendaharaan memastikan agar Badan Layanan Umum (BLU) sebagai agen pemerintah memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan terus berinovasi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional sekaligus mendukung reformasi structural.	
5.	Rapat Kerja dengan Bank Indonesia	Evaluasi kebijakan Bank Indonesia Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022	1. Komisi XI DPR RI mengapresiasi upaya Bank Indonesia dalam mengarahkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas perekonomian.	Rapat tanggal 22 Maret 2022
			2. Komisi XI DPR RI mendukung upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas di tengah normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara maju yang dilaksanakan melalui fleksibilitas nilai tukar dan penyesuaian <i>yield</i> yang bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, stabilisasi nilai tukar melalui <i>triple intervention</i> , normalisasi kebijakan	

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			likuiditas melalui operasi moneter dan kenaikan secara bertahap GWM dengan tetap menjaga kemampuan bank memberikan kredit dan partisipasi pembelian SBN dan koordinasi dengan Pemerintah terkait pengendalian inflasi, pembiayaan fiskal, serta sektor prioritas.  3. Bank Indonesia memastikan arah kebijakan makroprudensial agar dapat mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha melalui kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk menjaga ketahanan dan meningkatkan inklusi keuangan serta sinergi kebijakan nasional bersama Pemerintah.	
			4. Dalam mencapai arah kebijakan sistem pembayaran di tahun 2022, Bank Indonesia agar memfokuskan pada percepatan konsolidasi industri sistem pembayaran yang cepat, murah, efisien, aman, dan handal melalui integrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas, praktik yang efisien, dan wajar, elektronifikasi keuangan Pemerintah Daerah melalui TP2DD,	

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			penerbitan digital rupiah, dan juga meningkatkan literasi digital.	
			5. Bank Indonesia berkomitmen untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan anggaran yang diarahkan untuk mendukung stabilitas moneter, sistem pembayaran dan pemulihan perekonomian nasional.	

## LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN LEGISLASI (BALEG)

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
1	Badan Legislasi	1. Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pengesahan jadwal acara rapat-rapat baleg Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022. (tgl 15 Maret 2022, pukul 13.00 WIB).
		2. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka melanjutkan harmonisasi RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). (tgl 16 Maret 2022, pukul 10.00 WIB).
		3. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka harmonisasi RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT). (17 Maret 2022, pukul 13.00 WIB).
		4. Kunjungan kerja Badan Legislasi dalam rangka pembahasan RUU tentang Pendidikan Kedokteran ke Provinsi Sumatera Utara, Bali dan Papua Barat pada tanggal 21 sampe dengan tanggal 23 Maret 2022.
		5. Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, dan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka Pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (24 Maret 2022, pukul 10.00 WIB).
		6. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), Ketua Internastional NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Ketua Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET) dalam rangka Pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (24 Maret 2022, pukul 13.00WIB).

## LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP)

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	BKSAP - KSB	FGD GKSB DPR RI – Parlemen Palestina	GKSB DPR RI – Parlemen Palestina mengadakan FGD bersama Kemlu dan NGO yang bergerak di bidang kemanusiaan dan selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Acara dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Palestina, Dr. H. Syahrul Aidi Ma'azat (F-PKS) dan dihadiri oleh Anggota GKSB DPR RI – Parlemen Palestina, Darul Siska (F-PG) dan Samsu Niang (F-PDIP), Dubes Palestina untuk Indonesia, Dr. Zuhair Al-Shun, Direktur Timur Tengah Kemlu Bagus Hendraning Kobarsyih, serta perwakilan dari NGO terkait, antara lain: Adara Relief International, Aksi Cepat Tanggap (ACT), Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI), Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP), Mer-C, dan Nusantara Palestina Center (NPC). NGO yang hadir memaparkan hasil kerja selama ini dan tantangan yang dihadapi dalam pemberian bantuan kepada Rakyat Palestina dan berharap dukungan dari Parlemen dan juga Pemri sehingga mereka dapat menjalankan misinya dengan lancar dan aman.	Tgl. 15 Maret 2022
2.	BKSAP - KSB	Rapat internal GKSB DPR RI –	Rapat internal dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI – Parlemen AS, Charles Honoris (F-PDIP) dan dihadiri oleh Anggota GKSB DPR RI – Parlemen	Tgl. 16 Maret 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Parlemen Amerika Serikat	Jerman secara fisik dan virtual, G. Budisatrio Djiwandono (F-Gerindra), Marinus Gea, S.E. (F-PDIP), dan H. Zulkifli Anwar (F-PD)  Rapat internal membahas program kerja dan rencana kunjungan ke Washington DC, AS. Ketua GKSB mengagendakan pertemuan dengan Dubes AS untuk membahas rencana kunjungan dan program kerja GKSB DPR RI – Parlemen AS. Kunjungan yang direncanakan terselenggara pada September 2022 itu nantinya akan berfokus pada isu-isu strategis yang menjadi kepentingan nasional Indonesia dan memperkuat hubungan	
3.	BKSAP - ABA	BKSAP SDGs Day dalam rangka sosialisasi diplomasi Parlemen dan optimalisasi potensi daerah menuju pembangunan berkelanjutan di Padang, Provinsi Sumatera Barat	BKSAP SDGs Day dengan tema "Urgensi SDGs dan Momentum Presidensi G20 Indonesia 2022 dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Istana Gubernur Sumatera Barat dipimpin oleh Ketua BKSAP Dr.H. Fadli Zon,S.S., M.Sc (F-PGerindra) didampingi oleh 2 (dua) Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana, MBA (F-PD) dan Ir. H.A. Hafisz Thohir (F-PAN), serta Anggota BKSAP Drs. Darul Siska (F-PGolkar).  Pada acara tersebut, Delegasi berdialog dengan Gubernur Sumatera Barat beserta jajaran, Rektor, mahasiswa, dan segenap sivitas akademika Universitas Andalas di Kota Padang.	Tgl. 18 Maret 2922

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	BKSAP - KSI	Pertemuan Ketua DPR RI dengan Forkopimda membahas persiapan persidangan Umum ke-144 Inter- Parliamentary Union ke-144	Delegasi DPR RI dipimpin oleh Dr. (H.C) Puan Maharani mengadakan pertemuan dengan Forkopimda dan Panitia persiapan Sidang Umum ke-144 Inter-Parliamentary Union di (IPU) di Bali.  Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah Daerah maupun instansi yang terkait persiapan persidangan. Sejauh ini persiapan telah berjalan dengan baik, termasuk kesiapan Bali sebagai tuan rumah penyelenggaraan sidang internasional antar-parlemen tersebut.	Tgl 14 Maret 2022
5. BKSAP - KSI Sidang Umum ke- 144 Inter- Parliamentary Union (IPU) and related meetings di Nusa Dua Bali		144 Inter- Parliamentary Union (IPU) and related meetings di Nusa	DPR RI sebagai tuan rumah Sidang Umum ke-144 IPU and related meetings mengusung tema Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change.  Sidang yang dihadiri oleh 178 negara anggota IPU dan 14 Associate Member membahas isu-isu kemanan, pembangunan berkelanjutan, serta demokrasi dan HAM.  Tema yang diangkat pada pertemuan kali ini adalah "Getting to zero: Mobilizing parliaments to act on climate change". Tema besar ini diangkat sesuai dengan kecenderungan dunia dewasa ini yang semakin menyadari pentingnya isu perubahan iklim, dimana parlemen dapat berkontribusi lebih besar.	Tgl. 20 – 24 Maret 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Perhelatan ini juga beragendakan Forum-forum Women Parliamentarians dan Young Parliamentarians, serta beberapa pertemuan Standing Committee yang focus kepada isu isu tertentu seperti keamanan, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan berkelanjutan.	
			Pertemuan kali ini juga menghasilkan outcome document yang bertajuk <u>"Peaceful resolution of the war in Ukraine, respecting international law, the Charter of the United Nations and territorial integrity"</u> , sebagai respon atas invasi Rusia atas Ukraina.	
			Delegasi Indonesia dipimpin oleh Ketua DPR RI, Dr (HC) Puan Maharani didampingi oleh 4 (empat) Pimpinan BKSAP dan 52 Anggota BKSAP DPR RI lainnya.	
			Pertemuan kali ini dihadiri 415 anggota parlemen, dimana 160 di antaranya adalah anggota parlemen perempuan, serta 114 anggota perlemen muda di bawah 45 tahun. Pertemuan ini juga dihadiri oleh 30 Ketua Parlemen negara-negara anggota IPU.	

# LAPORAN DWI MINGGUAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD)

NO	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	Rapat Intern & Pimpinan	Sesuai arahan Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan Rapat Pimpinan dan Rapat Intern dilaksankan pada tanggal 17 Maret 2022	Rapat tersebut membahas mengenai program kerja Mahkamah Kehormatan Dewan pada Masa Sidang IV tahun sidang 2021 – 2022 dan membahas surat surat ke Mahkamah Kehormatan Dewan
2	Menghadiri undangan penganugerahan Badan Kehormatan Award Tahun 2021	Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan menghadiri penganugarahan Badan Kehormatan Award Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Kehormatan Provinsi Bandung pada tanggal 17 Maret 2022	
3	Kunjungan Kerja Dalam Negeri	Mahkamah Kehormatan Dewan telah melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dalam rangka Sosialisasi Tugas dan Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Anggota DPR RI	
4	Paket Meeting	Kegiatan Paket Meeting Mahkamah Kehormatan Dewan yang dilaksanakan di Wisma DPR RI Griya Sabha Kopo, Jawa Barat pada tanggal	

NO	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<ul> <li>Tanggal 18 – 20 Maret 2022 bertema         "Hak Imunitas Anggota DPR RI" dengan         mengundang Atma Suganda, SH.,         M.Hum sebagai Narasumber</li> <li>Tanggal 25 – 27 Maret 2022 bertema         Peran Mahkamah Kehormatan Dewan         di tengah persepsi dan sorotan publik         tentang penegakan kode etik anggota         DPR RI yang kurang optimal dengan</li> </ul>	
		mengundang Prof. Dr. Burhan Magenda sebagai Narasumber	

## LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT)

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1.	Rapat Intern, 15 Maret 2022 Agenda: Penetapan Jadwal Kegiatan BURT MS IV TS 2021-2022		
2.	Rapat BURT dengan Asuransi Jasindo Kamis-Sabtu, 17-19 Maret 2022 Agenda: Evaluasi dan Koordinasi terhadap Pelaksanaan Program Jamkestama Bagi Anggota DPR beserta keluarganya.	<ol> <li>Asuransi Jasindo akan menyampaikan laporan rutin (triwulan) mengenai Anggota DPR RI yang telah melakukan medical check up (MCU) dan jumlah peserta yang telah menggunakan pelayanan kesehatan Jamkestama.</li> <li>Asuransi Jasindo secara intensif akan melakukan sosialisasi tentang aplikasi program Jamkestama kepada Anggota BURT, termasuk kepada staf/tenaga ahli</li> </ol>	
3.	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Pengawasan pelayanan program Jamkestama yang dilaksanakan rumah sakit provider Asuransi Jasindo: 1. Tanggal, 21-23 Maret 2022, ke Solo. 2. Tanggal 27-29 Maret 2022 ke Surabaya, Jawa Timur.	nya.  Peninjauan rumah sakit provider Asuransi Jasindo dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, hasil peninjauan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi BURT terhadap pelayanan program Jamkestama.	

N	0	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
4	.⊤	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka	Peninjauan ke bandara untuk melihat	
		Peninjauan pelayanan keprotokolan untuk	kesiapan bandara dalam memberikan	
		Anggota DPR RI di Bandara, Tanggal, 24-26	pelayanan keprotokolan bagi Anggota DPR RI	
		Maret 2022, ke Semarang, Jawa Tengah.	meliputi sarana, prasarana, dan sumber daya	
			manusia agar dapat berjalan dengan lancar.	

## LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN)

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<ul> <li>Dirjen Anggaran Kemenkeu RI</li> <li>Dirjen Keuangan Kemenkeu RI</li> <li>Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI</li> <li>Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI</li> <li>Deputi Bidang Pengembagan Regional Kementerian BPPN/BAPPENAS.</li> </ul>	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, Dirjen Keuangan Kemenkeu RI, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, dan Deputi Bidang Pengembagan Regional dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait permasalahan Dana Alokasi khusus (DAK).	Rapat Dengar Pendapat (RDP), tanggal 16 Maret 2022
2.	<ul> <li>Pemda Provinsi Sulawesi Selatan;</li> <li>Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dan;</li> <li>Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan.</li> </ul>	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemda Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait	Kunjungan Kerja dilaksanakan, tanggal 17 s.d 19 Maret 2022

			permasalahan Agraria/Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional.	
3.	<ul> <li>Pemda Provinsi Papua Barat</li> <li>Pemda Kota Sorong</li> <li>Pemda Kabupaten Raja Ampat;</li> <li>Kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, dan;</li> <li>Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat.</li> </ul>	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Sorong Provinsi Papua Barat, selanjutnya melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, Pemda Provinsi Papua Barat, Walikota Sorong, Wakil Walikota Raja Ampat dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait permasalahan Agraria/Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional.	Kunjungan Kerja dilaksanakan, tanggal 21 s.d 24 Maret 2022

\*\*\*\*